

KAJIAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI

Sutamat Arybowo¹

Abstract

This paper is part of desk research on the analytical reflection on daily lives. Writer tries to explain the importance of cultural studies from philosophical perspective. The aim of the approach of this writing is to put culture in its proper context, in order to give better recommendation for cultural policy reform.

Recent years has witnessed the vast and dynamic development of cultural studies. One of the approaches is by using philosophical perspectives and methods. Differs with other methods, this research tries to prove that scientific truth can be reached through philosophical reasoning, which includes three main components, namely ontology, epistemology and axiology.

With this method, culture has found a new meaning as “a process of understanding”, and no longer it is seen as something that is already “given”. This “process” is continuously negotiated through the whole social interaction, which depend on the characters of power relation and other relations in the society that changes from time to time.

Keywords: cultural studies, philosophical perspectives

Pendahuluan

Dinamika kajian budaya (*cultural studies*) telah membawa pengaruh penting dalam memahami sebuah kebudayaan. Mengkaji sebuah kebudayaan berarti harus berani mendefinisikan kembali kebudayaan itu sendiri sebagai sebuah proses pemaknaan. Kebudayaan bukan dipandang sebagai hal generik yang merupakan pedoman yang diturunkan atau diwariskan, melainkan dipandang sebagai kebudayaan diferensial yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial. Kebudayaan semacam itu bukan lagi suatu warisan yang secara turun-

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha Lantai 9, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, E-mail: s_arybowo@yahoo.com.

temurun dibagi bersama secara kolektif, melainkan lebih bersifat situasional yang keberadaannya bergantung kepada karakter kekuasaan dan hubungan yang berubah dari masa ke masa secara kontekstual. Asumsi tersebut sekaligus menegaskan bahwa betapa dekatnya kebudayaan menyatu dengan kehidupan sehari-hari umat manusia (Kleden, 2006).

Kajian budaya memberi ruang gerak secara leluasa untuk merespons pergeseran konteks semacam itu. Hal ini menunjukkan pula adanya perubahan perspektif sebagai respons atas perkembangan studi lapangan antropologi masa lalu. Ini berarti ada kecerdasan melihat bidang-bidang kajian yang menyangkut keterbukaan penelitian kebudayaan, khususnya dalam melihat bagaimana makna kebudayaan mengalami konstruksi, reproduksi, dan dekonstruksi dalam berbagai sub-kultur (Abdullah, 2006:9). Apabila terjadi konstruksi dan reproduksi kebudayaan, berarti merupakan proses penegasan identitas budaya yang dilakukan oleh berbagai pertemuan-pertemuan kebudayaan yang menegaskan eksistensi kebudayaan asalnya. Hal ini akan tampak dan diperlihatkan pada berbagai bentuk ekspresi kebudayaan yang direpresentasikan para elite kekuasaan yang ada di daerah-daerah di wilayah Nusantara. Kebudayaan dalam konteks semacam ini dihadirkan melalui dekonstruksi dan pertarungan makna yang menegaskan kehadiran identitas kelompok. Meskipun masing-masing kelompok cara merepresentasikannya berbeda, tetapi dasar konstruksi dan reproduksi kebudayaan lebih disebabkan adanya usaha menghadirkan masa lalu ke dalam kehidupan masa kini. Dalam kaitannya dengan realitas politik kebudayaan dan identitas budaya, maka dapatlah dijelaskan dengan berbagai pemaknaan. Di sini sangat jelas, dalam kajian budaya telah memandang bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan sebuah proses yang diperjuangkan secara terus menerus dengan pemaknaan.

Perlu dipahami bahwa kajian budaya merupakan kawasan pluralistik dari berbagai perspektif yang bersaing, lewat produksi teori, berusaha mengintervensi politik budaya. Kajian budaya juga mengeksplorasi kebudayaan sebagai praktik pemaknaan dalam konteks kekuatan sosial. Dalam melakukan hal ini banyak mengambil berbagai teori, termasuk Marxisme, Strukturalisme, Pascastrukturalisme dan Feminisme. Dengan metode yang eklektis, kajian budaya menyatakan posisionalnya pada semua ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuannya sendiri yang menyatu di sekitar ide-ide utama kebudayaan, praktik

pemaknaan, representasi, diskursus, kekuasaan, artikulasi, teks, pembaca dan konsumen.

Kajian budaya juga merupakan bidang penelitian multidisipliner atau post-disipliner yang mengeksplorasi produksi dan pemakaian peta makna. Karena itu dapat dideskripsikan sebagai permainan bahasa atau bangunan diskursif yang terkait dengan isu kekuasaan dalam praktik pemaknaan kehidupan manusia. Kajian budaya dalam hal ini dianggap suatu proyek cair dan luar biasa yang mengisahkan citra tentang dunia yang tengah berubah dengan harapan agar manusia dapat memperbaikinya (Barker, 2004:36). Kalau gagasan ini dipahami, berarti merupakan kerja besar dalam rangka mengangkat kajian budaya sebagai perangkat utama untuk membela yang lemah dengan penalaran intelektual.

Pada era post-modern, akhirnya banyak ilmuwan yang menyerah dan mengakui adanya sesuatu yang disebut *the other* (yang lain) dalam peradaban kemanusiaan. Realitas tersebut merupakan paradigma baru dalam kajian budaya. Hal seperti ini bukan tidak mungkin merupakan suatu bentuk pasca-antropologi dan sosiologi. Ini berarti paradigma substansial studi kebudayaan yang dulu didominasi antropologi sudah berakhir. Selain itu pada bidang teknologi pun telah terjadi pergeseran dari abad teknologi menjadi abad pencitraan (Piliang, 2004). Inilah pentingnya dibuka selebar-lebarnya kajian budaya di Indonesia, dalam rangka turut mengantisipasi perubahan besar dunia.

Artikel ini, ingin menjelaskan pentingnya kajian budaya dewasa ini dalam hubungannya dengan masalah filosofi, untuk menjadi bahan agar kebudayaan dilihat dalam konteks yang sewajarnya. Di sini diharapkan supaya dapat memberikan jalan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang kebudayaan secara tepat. Selain itu juga menjelaskan pengembangan kajian budaya dari perpektif filosofi. Dalam memberikan penjelasan ini digunakan pendekatan filosofi, dalam arti agar kebenarannya dapat dicapai melalui penalaran tiga komponen, antara lain: ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Munculnya Kajian Budaya

Kajian Budaya pertama kali muncul di Inggris. Pada tahun 1960-an, Universitas Birmingham salah satu universitas tua di Inggris, telah melakukan penelitian di bawah *Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies*. Kontribusinya antara lain membuat

studi untuk mencari makna ideologis dari bentuk kebudayaan yang ada. Melalui *Birmingham Centre* ini beberapa ilmuwan telah memelopori pemakaian semiotika dalam *cultural studies*. Pada mulanya tema-tema penelitiannya masih terbatas mengenai hal-hal kecil, seperti gaya hidup para remaja, mode pakaian, musik dan karya-karya fiksi. Kemudian memfokuskan pada penelitian sub-kultur dan kebudayaan marjinal. Dari *Birmingham Centre* inilah, kemudian menjadi sumber inspirasi dalam kajian budaya di seluruh dunia (Barker, 2004:6).

Pada tahun 1960-an di Jerman terdapat pula kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan *Frankfurt School*² atau kelompok *New Left*, padahal isinya adalah kajian budaya. Di Amerika Serikat berkembang kajian budaya dengan tema untuk mengkaji *mass culture* (budaya massa) dan “budaya pop”. Dalam perkembangan selanjutnya di Amerika Serikat, Australia, Afrika, dan Amerika Latin, kajian budaya mencari bentuknya sendiri. Sampai tahun 1990-an tema kajian yang dimunculkan *Birmingham Centre* maupun *Frankfurt School* tersebut masih aktual untuk dibicarakan. Adapun di Indonesia studi kebudayaan masih belum memasuki tema-tema kebudayaan marjinal atau hal-hal kecil seperti di atas. Studi kebudayaan di Indonesia masih menekankan kepada tema-tema besar dan teori-teori etnologi atau etnografi yang mengacu pada studi antropologi.

Di Eropa ada usaha untuk membangun kajian budaya sebagai disiplin ilmu tersendiri. Bennett (1998) menawarkan landasan kajian budaya, seperti berikut: (i) Kajian budaya adalah suatu kawasan interdisipliner dimana perspektif dari disiplin yang berlainan secara selektif dapat diambil dalam rangka menguji hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan; (ii) Kajian budaya terkait dengan semua praktik, institusi dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai, kepercayaan, kompetensi, rutinitas kehidupan, dan bentuk-bentuk kebiasaan perilaku suatu masyarakat; (iii) Bentuk-bentuk kekuasaan yang dieksplorasi oleh kajian budaya sangat beragam, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dan lain-lain. Kajian budaya berusaha mengeksplorasi hubungan antara bentuk-bentuk kekuasaan ini dan berusaha mengembangkan cara berpikir tentang kebudayaan dan

²Sebuah mazhab keilmuan atau aliran yang berkembang di Jerman Barat pada saat itu. Tokohnya antara lain, Adorno, Horkheimer, dan Herbert Marcuse. Berhubung pikiran mereka sangat radikal, pada masa itu kelompok lain menyebutnya sebagai ilmuwan yang mengikuti aliran “kiri baru”.

kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah agen dalam usahanya melakukan perubahan, dan (iv) Kawasan institusional utama bagi kajian budaya adalah Perguruan Tinggi, dengan demikian kajian budaya menjadi disiplin akademis seperti yang lain. Meskipun demikian kajian budaya mencoba membangun hubungan di luar akademis dengan gerakan sosial dan gerakan politik, para pekerja dalam institusi-institusi budaya dan manajemen budaya.

Dalam perkembangannya, kajian budaya juga muncul di Indonesia, walaupun belum meluas seperti di Eropa dan Amerika. Dewasa ini kajian budaya di Indonesia telah dikembangkan di Universitas Udayana Denpasar, di Universitas Indonesia Jakarta, dan dibuka di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), telah memulai dengan kegiatan diskusi-diskusi dan kegiatan penerbitan, antara lain: Bentara Budaya Jakarta, Teater Utan Kayu (TUK), Desantara Depok, Asrama Realino dan Yayasan Rumah Cemeti Yogyakarta. Hingga kini para penggagas kajian budaya di Indonesia ingin agar pendekatan yang dipakai untuk mendiagnosa fenomena budaya benar-benar menggunakan metode kritis.

Realitas Kebudayaan

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat untuk mengatasi krisis multidimensional, salah satunya adalah krisis di bidang kebudayaan yang belum tersentuh untuk ditangani secara serius. Memang bangsa Indonesia sedang sibuk melanjutkan proses reformasi, namun masih berketat untuk membicarakan pembangunan ekonomi karena dianggap sebagai skala prioritas untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari. Para “elite” sekarang barangkali memandang bahwa urusan yang bersifat ekonomi hanya dilihat sebagai sesuatu yang menyangkut kesejahteraan hidup, khususnya dari sudut material.

Untuk itu para peneliti diharapkan segera mencermati, apa sebenarnya yang tersangkut ke dalam urusan ekonomi tersebut. Seperti tampak di mana-mana, hal yang dibutuhkan orang dan hal yang diijakan orang, bukan lagi komoditi berupa benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik, melainkan semakin merambah ke kebudayaan, pikiran, selera, dan citarasa, yang tersebar melalui transfer ekonomi. Menyebarnya unsur-unsur itu secara halus

dan dapat terjadi secara langsung karena unsur itu terkandung di dalam hasil “industri budaya” yang diperdagangkan. Dapat juga terjadi secara tidak langsung melalui penciptaan sistem yang seolah-olah mengikat masyarakat, seperti dalam sistem media massa pada umumnya. (Sedyawati, 2004:2).

Hadirnya industri budaya, seperti KFC, Mc Donald, cafe-cafe, vcd, dvd, dan internet dari kota besar hingga ke kota kecil bahkan sampai di pedesaan, telah membawa penduduk setempat pada suatu gaya hidup baru dan hanya menonjolkan sisi hiburannya. Di satu pihak hal itu merupakan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi di lain pihak, cenderung menjauhkan orang dari kebanggaan terhadap kekayaan budaya sendiri.

Munculnya industri budaya hingga ke pedalaman tersebut bukan harus dibenci, melainkan perlu disikapi dan diwaspadai. Memang ada industri budaya yang bermanfaat yang dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, tetapi tidak sedikit yang merugikan kebudayaan milik bangsa sendiri.

Penayangan media massa dalam bentuknya audio-visual dapat digolongkan sebagai industri budaya, walaupun dibungkus dengan menekankan aspek informasi. Jadi industri budaya adalah mencakup segala yang menghasilkan produk pesan budaya dan berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan dan dapat mempengaruhi pandangan hidup, pikiran, sikap, perilaku, dan selera masyarakat yang mengkonsumsinya. Secara konkrit dapat pula berupa buku bacaan, vcd, dvd, seni kriya, kerajinan, rekaman musik, film, sinetron, kemasan makanan, pakaian, dan sebagainya.

Paling kurang ada tiga hal yang dijadikan titik persoalan sehingga kajian budaya memiliki posisi penting untuk dikembangkan di Indonesia.

- **Fase Budaya Industri**

Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia telah menjalankan pembangunan dan modernisasi, melalui pentahapan lima tahunan yang dikenal dengan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” (Repelita). Selama pemerintahan Orde Baru tersebut telah berhasil dilaksanakan

enam kali Pelita.³ Pada Pelita I (1968–1973) dan Pelita II (1973–1978) dilaksanakan melalui konsep Trilogi Pembangunan, dengan urutan: (i) Pertumbuhan ekonomi; (ii) Pemerataan pembangunan, dan (iii) Stabilitas sosial. Hasilnya adalah pembangunan di bidang stabilitas sosial dapat mencapai target kehidupan politik dan keamanan, dan dibidang ekonomi mengalami kemajuan yang begitu cepat, namun pemerataan tertinggal, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Karena itu pada Pelita III (1978–1983) skala urutan Trilogi Pembangunan diubah menjadi: (i) Pemerataan pembangunan; (ii) Pertumbuhan ekonomi, dan (iii) Stabilitas sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Hingga Pelita IV (1983–1988) dapat dikatakan pembangunan fisik dan proses modernisasi di Indonesia telah mencapai kemajuan, sehingga jumlah kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan. Dalam tataran fisik telah terjadi perubahan dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Pada periode tersebut telah terjadi mekanisasi pertanian dan proyek pelistrikan masuk desa. Jalan-jalan desa, terutama di pulau Jawa telah dikeraskan dan ditingkatkan fungsinya. Jalur transportasi, informasi, dan komunikasi mulai maju dan menyebar hingga ke daerah terpencil di tanah air.

Sayang sekali keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan perubahan pikiran dan belum dipersiapkan komponen mengenai masyarakat industri. Padahal di negeri industri maju, seperti di Jerman, masyarakatnya pernah mengalami kegoncangan akibat manusia mengalami keterasingan dengan dunianya. Herbert Marcuse (1964) dalam bukunya yang berjudul *One Dimensional Man* telah mengkritik bahwa masyarakat industri maju adalah manusia yang berdimensi satu. Hal ini menyalahi kodrat manusia yang sesungguhnya berdimensi banyak.

Masyarakat industri maju pada saat itu juga mendapat kecaman dari kelompok *Frankfurt School* lainnya, seperti dikatakan oleh Horkheimer bahwa ada kecenderungan masyarakat industri modern itu mengalami dilema manusia rasional (Sindhunata, 1983:4). Kelihatannya keberhasilan yang dicapai atas modernisasi sangat rasional, tetapi jika

³Satu kali Pelita belum terlaksana, yakni Pelita VII (ketujuh), karena terjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara dan Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya.

dilihat terjadi ketergantungan dan kesenjangan juga keterasingan berarti hal itu irasional.

- **Fase Budaya Transisi**

Bangsa Indonesia pernah mengalami masa transisi, yakni pada waktu terjadi perubahan sosial bersamaan dengan saat keberhasilan Pelita V (1988–1993) dan Pelita VI (1993–1998). Perubahan sosial yang berlangsung secara mendadak dan diikuti pula lompatan mobilitas sosial vertikal secara tiba-tiba, membawa beban kultural pada masyarakat. Menurut Victor Turner (sebagaimana dikutip Sairin, 2002:19), masyarakat yang mengalami proses perpindahan status berada pada suatu fase yang disebut *liminality* (liminalitas). Dalam fase itu masyarakat yang mengalami perubahan sebenarnya belum meninggalkan status lamanya secara keseluruhan dan belum pula menginjak status barunya dengan seutuhnya (Sairin, 2002: 196).

Masyarakat yang mengalami perubahan sosial diibaratkan sedang berdiri di pintu gerbang, tidak berada di dalam budaya lamanya dan tidak pula dalam budaya baru yang sedang dijejakinya. Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia terdapat dua hal penting, sehingga terjadi mobilitas sosial vertikal secara besar-besaran. Pertama, ketika bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Kedua, ketika pemerintah Orde Baru mendapat keuntungan besar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, terutama atas naiknya harga minyak bumi pada tahun 1970-an.

Masyarakat yang mengalami fase transisional seolah-olah tidak punya norma dan sistem nilai yang jelas. Pada masa Orde Baru terjadi pola kehidupan yang koruptif akibat beban kultural. Beban ini muncul akibat kondisi transisional dengan semakin maraknya budaya konsumtif di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu ada semacam ekspektasi pada diri masyarakat dalam menduduki jabatan tertentu untuk memenuhi standar simbol-simbol kehidupan tertentu sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai contoh anak petani tiba-tiba dapat menjadi pegawai negeri, atau seorang pegawai negeri tiba-tiba dipromosikan menjabat struktural dalam birokrasi. Akibat mobilitas sosial vertikal seperti itu maka beban kultural melekat padanya.

Terjadinya mobilitas sosial vertikal secara besar-besaran tersebut, dapat mengubah pejabat yang latar belakangnya dari kelas bawah memikul beban kultural yang melandasi praktik korupsi, seperti

mereka harus menyantuni keluarga atau kerabat. Hal ini juga melekat pada kebudayaan negara-negara berkembang pada umumnya. Pada masyarakat seperti itu setiap “pemberian” harus dikembalikan. Pengasuh kasih sayang anak perlu dikembalikan kepada keluarga, jika seorang anak sudah mampu berdiri sendiri atau menjadi “orang”.⁴

Menurut Sairin, budaya konsumtiflah yang sangat riskan terhadap perilaku korupsi. Wong Cilik yang mengalami mobilitas vertikal begitu cepat, bisa melakukan budaya “nrabas” (menerobos). Dalam kaitan ini kata-kata “proyek” menjadi sangat bermakna. Orang memilih pekerjaan di tempat yang “basah” dan tidak mau di tempat yang “kering”. Pada zaman Orde Baru, para eksekutif muda dengan bangganya mencari pekerjaan di wilayah “basah”. Jabatan-jabatan di tempat yang basah selalu menjadi rebutan. Di sinilah menjadi awal munculnya pengelompokan sehingga beban kultural itu makin membebani kehidupan dan pola konsumtif makin menyebar tak terbendung (Sairin, 2002:218).

Budaya transisi juga muncul dari fenomena perubahan sosial yang sifatnya simultan, seperti tampak dalam masyarakat dewasa ini. Paling kurang terdapat tiga kategori masa transisi tersebut (Wibisono 2004: 8), yaitu: (i) Masa transisinya masyarakat dengan budaya agraris-tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri-modern. Dalam hal ini peran mitos mulai diambil alih oleh logos (akal pikir). Bukan lagi kekuatan-kekuatan kosmis yang secara mitologis dianggap sebagai penguasa alam sekitar, melainkan akal pikir dengan daya penalarannya yang handal dan kini dijadikan kerangka acuan untuk meramalkan dan mengatur kehidupan; (ii) Masa transisinya budaya etnis-kedaerahan menuju budaya nasional-kebangsaan. “Puncak-puncak kebudayaan di daerah” sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mencair secara konvergen menuju satu kesatuan pranata demi tegaknya suatu negara-kebangsaan; (iii) Masa transisinya budaya nasional-kebangsaan menuju budaya global-mondial. Dalam hal ini visi,

⁴Menurut tradisi Jawa, sebutan menjadi “Orang” maksudnya sudah sukses dalam kehidupan, baik secara status sosial maupun ekonomi. Secara simbolik, menjadi “Orang” berarti sudah memiliki 5 hal, yaitu: *wismo*, *garwo*, *kukilo*, *turonggo*, *cirigo*, (rumah, isteri, burung, kuda, keris). Dewasa ini dikonkritkan dalam bentuk: rumah gedung bertingkat, isteri yang cantik, hiburan audio-visual, mobil mewah, dan senjata api atau rumahnya dijaga satpam.

orientasi, dan persepsi mengenai nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, kebebasan, juga mengenai masalah lingkungan hidup, dilepaskan dari ikatan fanatisme primordial kesukuan, ataupun keagamaan menuju ke kesadaran mondial dalam satu kesatuan sintesis yang lebih konkrit.

Pada hakikatnya masa transisi tersebut adalah bersangkutan dengan problem budaya. Oleh karena itu jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan secara psikologis akan menjadi hambatan dalam mengatasi ketenteraman masyarakat, dan dampaknya bisa terjadi ketidakstabilan sosial.

Fase Budaya Global

Menurut sejarah, istilah global atau globalisasi sebenarnya bukan barang baru. Dipandang dari segi historis, gejala globalisasi pada masa lalu dikenal sebagai gejala mondialisasi, yang sejak zaman kuno dialami oleh umat manusia. Hanya bedanya globalisasi masa kini mempunyai tempo amat cepat dan kontinyu serta intensif, karena media memakai teknologi yang semakin canggih (Kartodirdjo, 2003:11).

Penulisan sejarah umat manusia serta peradabannya yang disusun oleh UNESCO pada tahun 1950-an sudah dianggap tidak relevan lagi menjelang tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan selang tiga dasawarsa itu wajah permukaan politik dunia sudah berubah dengan banyaknya negara baru yang muncul. Selain itu, di sisi lain timbulnya kecenderungan kuat ke arah integrasi yang semakin meluas serta dibentuknya unit komunitas supra-nasional seperti Uni Eropa, ASEAN, APEC dan sebagainya.

Sementara Uni Eropa mengalami integrasi pesat dengan diawali realisasi satu mata uang, tetapi pada masa reformasi ada kontradiksi nyata timbulnya gerakan neo-etnisitas dan separatisme di Indonesia. Misalnya, gerakan Papua Merdeka, Aceh Merdeka, dan Riau Merdeka. Juga kerusuhan-kerusuhan etnis dan agama di beberapa tempat, seperti di Ambon, Poso, Palu, Sampit, Sambas, dan pembunuhan para Kiai di Banyuwangi. Masalah di Indonesia sangat kompleks, oleh karena itu perlu hati-hati dan tidak membuat distorsi gambaran realitas, perlu diperhitungkan baik proses globalisasi maupun faktor primordial dan sifat pluralistik pada umumnya dan potensi konflik lainnya.

Walaupun lambat, secara gradual permasalahan integrasi dan politik tampaknya bisa diatasi. Justru yang sulit adalah pembangunan ekonomi yang sudah amburadul dengan industri budaya yang diakibatkan oleh merambahnya globalisasi yang tidak terasa meluasnya. Perkembangan teknologi transportasi, informasi, komunikasi, dan gaya hidup masyarakat industri, membawa bangsa Indonesia berada di dalam alam liminalitas. Berarti masyarakatnya mengalami kegoncangan yang dahsyat, secara ekonomi tidak bisa lagi memperhitungkan jumlah penghasilan dengan jumlah pengeluaran sehari-hari. Gaya hidup konsumtif makin merajalela, sehingga keadaan ekonomi dari sektor yang terkecil yaitu keluarga akan mengalami defisit terus menerus dan tidak disadarinya. Dengan demikian eksese globalisasi yang paling tidak dirasakan lagi yaitu kehidupan “kamufase”.⁵

Dampak globalisasi menunjukkan pula berkembangnya suatu standarisasi kehidupan di berbagai bidang, dan hal itu semakin kompleks karena masyarakat hidup dengan standar ganda. Di satu pihak, orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang melahirkan *sub-culture*. Di pihak lain, muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab nestapa dari mereka yang dipinggirkan, dan melahirkan *counter culture* (Wibisono, 2004:9).

Berdasarkan identifikasi tiga fase di atas, yakni munculnya budaya industri, budaya transisi, dan budaya global, mau tidak mau, perlu diterima sebagai realitas budaya dan disikapi secara bijak. Pada zaman sekarang sungguh tidak bisa melawan globalisasi secara frontal atau lebih-lebih dengan cara “terorisme”. Globalisasi adalah jiwa zaman, sehingga perlu dihadapi dengan usaha rasional dan produktif dengan etos baru, sebagaimana di lakukan oleh masyarakat Eropa. Begitu mereka membaca fenomena dunia akan mengalami krisis, kemudian mereka bersatu mendirikan Uni Eropa yang direalisasi dengan satu mata uang. Sekarang sejarah membuktikan bahwa negara-

⁵Dewasa ini banyak orang berpenampilan yang tidak jelas dan mengandung kepalsuan-kepalsuan. Rumahnya gedung bertingkat, tetapi kenyataannya hidupnya keropos. Mobilnya mewah, tetapi diperoleh dari kredit. Pakaiannya glamour, tetapi barang pinjaman. Pendeknya, penghasilan yang diperoleh dengan pengeluaran, ternyata lebih besar pengeluarannya, sehingga hidupnya selalu mengalami defisit.

negara kecil di Eropa tetap eksis di bawah lindungan Uni Eropa. Justru jenis mata uang yang berlaku di sana, yakni Euro, nilainya lebih tinggi dari US \$ milik Amerika Serikat.

Kasus Uni Eropa itu sekedar contoh bagaimana mereka menghadapi globalisasi. Negeri-negeri kecil saling melindungi hak miliknya, tanpa mengorbankan negeri anggota. Walaupun negerinya diterapkan pasar bebas, ia tetap bisa mempertahankan produk domestik tanpa takut bersaing dengan produk dari luar negeri. Inilah jiwa zaman, kalau suatu negeri menolak produk luar, berarti ia tidak akan bisa menjual produknya ke luar negeri. Padahal globalisasi tidak mengenal lagi batas ideologi, geografi, benua, etnis, agama, atau budaya. Secara budaya gerakan mereka adalah bagian dari pluralisasi dan menganggap dunia adalah satu.

Bagaimana dengan kasus di Indonesia? Negara Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis di dunia, yaitu berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dan Pasifik, dan dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perniagaan internasional. Letak Indonesia juga menjadi persinggahan yang dapat menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia yang begitu luas menghampar hingga ke benua Australia. Mengingat letak Indonesia yang terbuka itu, maka mau tidak mau globalisasi pasti akan merambah sampai ke pelosok tanah air. Bangsa Indonesia tidak perlu takut, tetapi justru harus memanfaatkan yang positif dan dapat mengambil keuntungan dari globalisasi tersebut.

Globalisasi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, dan untuk membuka daerah terpencil yang tertinggal. Namun agar bangsa Indonesia tidak terseret oleh arus globalisasi yang cepat tersebut, ia benar-benar harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM), seperti yang dilakukan Malaysia, Philipina, Taiwan, Cina, dan Korea Selatan. Supaya tidak terjerat oleh ketergantungan, bangsa Indonesia perlu membangun kembali etos-nasionalisme dan selalu mengadakan revitalisasi terhadap jiwa nasionalisme. Juga agar tidak terkontaminasi gaya hidup konsumerisme dan kemewahan, maka perlu disosialisasikan kembali paham “asketisme sosial” dan “asketisme intelektual”⁶ (Kartodirdjo, 2003:119).

⁶Menurut Prof. Sartono Kartodirdjo, para pemimpin zaman dulu seperti Soekarno dan Hatta perlu ditiru. Dalam berjuang dua pemimpin tersebut

Untuk menghadapi keterasingan, liminalitas, akibat globalisasi di atas, maka kajian budaya memiliki arti penting. Lebih-lebih dalam rangka ikut mengatasi krisis multidimensional di era reformasi sekarang ini akibat kekurangsiapan menerima budaya industri, budaya transisi, dan budaya global, kajian budaya diharapkan partisipasinya secara emansipatoris ikut menyelesaikan krisis itu.

Fondasi Utama Kajian Budaya

Setelah diketengahkan realitas budaya di bagian sebelumnya, kiranya lebih tepat bila diadakan perenungan filosofi. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai pandangan hidup yang sudah lama diyakini mengandung nilai-nilai yang dikembangkan dari bumi Nusantara. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan metode berpikir dalam memandang dunia tanpa batas diskriminasi (Joesoef, 1986:14). Dengan kelima silanya memberi keleluasaan mengajarkan suatu kombinasi dan keanekaragaman pikiran. Sejak lama Pancasila sudah mengenal pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh gerakan globalisasi sesungguhnya sudah terakomodasi di dalamnya.

Globalisasi adalah gerakan yang sangat halus, dan bisa masuk dari segala penjuru kehidupan. Orang tidak bisa menangkai begitu saja melalui ideologi negara atau dengan gerakan politik praktis. Dampak globalisasi yang paling dahsyat dan sulit ditangkal pada saat ini adalah penyebaran hasil “industri budaya”, yang merambah secara halus bisa mengubah jiwa manusia, pikiran, dan pandangan hidup masyarakat.

Realitas di lapangan, posisi bangsa Indonesia sekarang ini terdesak dan dilanda oleh hasil industri budaya milik negara maju, khususnya berupa produk audio-visual, seperti sinetron, rekaman audio-visual yang dapat dibeli di mana-mana sampai ke pelosok pedesaan. Hasil industri budaya itu juga menular ke produk dalam negeri, yang pada hakekatnya adalah tiruan belaka dari budaya bangsa lain. Hasil budaya yang serius tampak kalah oleh hasil budaya yang instan, ringan, glamour, dan sensasional. Oleh anak-anak muda, semua itu dianggap kebutuhan zaman dan dikehendaki oleh pasar.

mampu menahan diri, tidak menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, sampai perjuangannya berhasil. Dengan kata lain, jangan tergesa hidup mewah, sebelum cita-cita berhasil.

Menghadapi industri budaya tersebut, industri budaya milik bangsa Indonesia perlu dibela dan dibangkitkan, kebudayaan nasional Indonesia perlu dikuatkan kembali supaya berwibawa. Potensi kreatif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dilindungi dengan dukungan permodalan atau Undang-Undang Negara. Keterdesakan budaya yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara industri budaya dari negara maju dengan dari dalam negeri, maka perlu diatasi secara sistematis secepat mungkin melalui studi yang lebih serius (Sedyawati, 2004:11).

Hubungan Kajian Budaya dengan Filosofi

Apabila bangsa Indonesia ingin mengembangkan kajian budaya, secara substansial hendaknya memprioritaskan tema “industri budaya”, mengingat masalah ini belum ditangani secara serius. Industri budaya adalah anak kandung dari globalisasi yang sedang merambah tanah air Indonesia. Sudah barang tentu supaya kajian budaya memiliki empati atau keberpihakan pada industri budaya dalam negeri, maka diperlukan pendekatan yang mengandung perspektif filosofi. Ini berarti realita dan kebenaran itu perlu dilandasi beberapa komponen ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hal yang diusulkan tersebut adalah bersangkutan dengan proses pengembangan perusahaan ilmu pengetahuan dan menitikberatkan pada masalah hubungan antara dunia ilmiah dengan dunia kenyataan sehari-hari yang bersifat pra-ilmiah.

Dengan demikian hubungan kajian budaya dengan filosofi yang dulu belum mendapat perhatian ternyata dalam ilmu pengetahuan yang lain (setelah dihubungkan dengan konteks industri budaya), justru dapat menjadi pusat perhatian. Sifat sistematis yang melekat pada setiap kegiatan ilmu pengetahuan menyebabkan bahwa kegiatan ilmiah itu berusaha untuk meliputi segenap bidang yang dapat diselidikinya. Filosofi sebagai perenungan yang bersifat kritis terhadap hakikat ilmu yang integral dan integratif tidak dapat menghindarkan diri dari adanya pertanyaan yang mempersoalkan di manakah letak pemikiran yang bersifat ilmiah itu dalam keseluruhan kehidupan manusia di dunia.

Walaupun filosofi bersifat kritis terhadap hakikat ilmu, para ilmuwan tidak boleh beranggapan bahwa ilmu itu abadi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak abadi melainkan berubah. Apabila hal ini benar maka semua ilmu harus keluar dari persembunyian ketidakberubahan untuk mau disoroti oleh analisis-analisis perubahan (van Peursen, 1985:7). Filosofi kini semakin disadari oleh masyarakat

untuk dipahami mahasiswa, dosen, dan para pekerja ilmiah agar mereka dapat meletakkan jaringan interaksi menuju hakikat ilmu yang integratif tersebut. Kehadiran etika dan moral semakin dirasakan, sehingga sikap yang dahulu menganggap “ilmu adalah bebas nilai”, sekarang makin ditinggalkan orang.

Bidang yang digarap filosofi seperti disinggung di atas, antara lain mencakup komponen ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal itu diharapkan dapat menjadi penyangga eksistensi ilmu. Ontologi mencakup apa hakikat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filosofi tentang apa dan bagaimana (yang) “ada” itu. Epistemologi mencakup sumber, sarana, tata cara untuk menggunakan sarana tersebut dalam mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang dipilih, akal, pengalaman, atau intuisi. Aksiologi mencakup nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran dan kenyataan. Nilai-nilai ini wajib dipatuhi dalam kegiatan ilmiah baik dalam melakukan penelitian maupun dalam penerapan ilmu.

Mengikuti pandangan Bahm (1980), ontologi dari ilmu pengetahuan adalah “masalah”, epistemologinya adalah “metode”, dan aksiologinya adalah “sikap”. Karena itu komponen filosofi yang terdiri dari ontologi, epistemologi dan aksiologi, yang berkaitan dengan “apa”, “bagaimana” dan “mengapa” adalah landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu ontologi yang berkaitan dengan pertanyaan “apa” berarti menggambarkan “realitas” yang diteliti. Epistemologi yang berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana” artinya menggambarkan “metode” yang digunakan. Sedangkan aksiologi yang berkaitan dengan pertanyaan “mengapa/untuk apa” artinya menggambarkan nilai-nilai yang dianut atau “tujuan” penelitian.

Selain itu berpikir filosofi sangat penting, hal ini dapat mengajak para peneliti atau ilmuwan untuk bersikap rasional, kritis, terbuka, tidak fanatik, dan rendah hati dalam menyampaikan hasil temuannya. Berpikir filosofi ini dapat memberikan gambaran bagaimana hubungan berbagai cabang ilmu sehingga dapat mempermudah pendekatan antar disiplin. Dengan demikian, pengembangan kajian budaya sungguh perlu didampingi filosofi, karena akan mudah memahami pendekatan multidisipliner tersebut.

Apabila dihubungkan dengan tujuan program penelitian di beberapa lembaga penelitian, dalam hal ini termasuk di universitas-universitas, jelas filosofi sangat diperlukan, supaya seorang peneliti memiliki kualifikasi, sebagai berikut: (i) Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian; (ii) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; (iii) Mempunyai kemampuan pendekatan multidisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya. Kualifikasi yang diwujudkan dalam ketiga syarat tersebut, berarti filosofi patut diberikan atau dimasukkan di dalam etika penelitian atau sistem perkuliahan di Perguruan Tinggi.

Mengingat luasnya telaah bidang filosofi, maka untuk kajian budaya yang dipentingkan adalah dapat memahami proses kegiatan ilmiah dan metode berpikir kritis. Selama ini dalam memahami penelitian selalu dihadapkan pada pikiran “hitam-putih” dengan pendekatan “kuantitatif” atau “kualitatif”, tanpa mengetahui latar belakang pemilihan pendekatan tersebut. Padahal ketika seorang peneliti menentukan pilihan terhadap metode, sudah barang tentu ia sadar: Metode apa yang dipakai? Mengapa memilih metode tersebut? Apa alasan-alasannya? Juga sadarkah kelebihan dan kelemahan terhadap metode yang dipilih? Di sinilah peran filosofi akan menjelaskan sistem penelitian dan pengusahaan ilmu pengetahuan.

Dalam menentukan pilihan terhadap metodologi yang dilandasi filosofi tersebut juga akan berhadapan dengan beberapa aliran atau paham dalam kefilosafatan. Untuk itu yang perlu disadari oleh para peneliti, bahwa setiap aliran atau paham hampir punya kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian peneliti diharapkan supaya tidak terperangkap atas pilihan terhadap metode yang dipilihnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga implemetasinya ke modernisasi begitu cepat, sebagaimana tampak pada bidang transportasi, informasi, komunikasi, dan industri budaya, maka dalam hal ini komitmen bangsa Indonesia dalam menyusun strategi kebudayaan hendaknya menggunakan nilai budaya sendiri, seyogyanya filosofi Pancasila dapat pula dijadikan orientasi sebagai ilmu pengetahuan (Wibisono, 1987:38), agar bangsa Indonesia tidak terperangkap terhadap kemungkinan perubahan ilmu pengetahuan. Untuk membangun minat dalam usaha mengembangkan sistem filosofi

Pancasila tersebut maka diperlukan syarat, antara lain tersedianya kondisi psikologis bagi para ilmuwan agar bebas dan mandiri, serta dibutuhkan kematangan rasa tanggungjawab dalam arti luas, baik etis, moral, maupun religius.

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan di depan bahwa kajian budaya merupakan sebuah kajian multidisipliner yang mendasarkan dirinya pada gagasan budaya yang memiliki relasi sosial dan mencakup segala hal yang digunakan untuk mempelajari aneka implementasinya. Karakteristik yang diusulkan melalui makalah ini adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan proses globalisasi baik yang berlevel lokal, regional, nasional, maupun global. Dalam konteks itu kajian budaya perlu memperhatikan industri budaya yang merupakan gerakan halus yang dapat mengubah pikiran, pandangan hidup, citarasa suatu bangsa. Kemasan-kemasan baru berupa audio-visual yang ditayangkan lewat televisi, radio, surat kabar, majalah, CD ROM, internet, dan lain-lain, semuanya dengan terang-terangan berselamatkan informasi. Ditambah lagi perkembangan teknologi dunia digital dan selular, telah mengalahkan budaya lokal yang pada masa lalu menjadi acuan dalam kehidupan.

Pengembangan kajian budaya di Indonesia hendaknya jangan terjebak oleh redefinisi konsep kebudayaan, namun tetap kritis menghadapi fenomena budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, para tokoh pergerakan nasional membuktikan sangat kritis dan kreatif dalam melihat fenomena tersebut. Terbukti munculnya polemik kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1930-an. Sungguh menakjubkan dan pada masa itu benar-benar spektakuler dalam memahami konsep kebudayaan yang hingga kini tetap aktual (Mihardja, 1998: 30). Pada pasca kemerdekaan juga muncul tokoh-tokoh yang tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan atau organisasi kebudayaan, seperti Manifes Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lembaga Seni Budaya Muslimim, Lembaga Kebudayaan Nasional, dan sebagainya. Pikiran-pikiran mereka dapat membongkar atau mendekonstruksi kezaliman kekuasaan melalui kritik kebudayaan.

Dalam perkembangannya dewasa ini kajian budaya berusaha mencari penjelasan perbedaan kebudayaan dan praktik kebudayaan, tidak dengan menunjuk nilai-nilai intrinsik yang abadi, melainkan menunjuk seluruh peta relasi sosial. Karena itu secara keilmuan ia

terbuka menampung segala aspirasi ilmiah untuk melihat fenomena budaya yang dihadapi umat manusia, khususnya mengenai globalisasi. Maka kajian budaya diharapkan dapat membangun sebuah kerangka kerja dan berusaha menempatkan atau menemukan kembali kebudayaan dari komunitas yang sampai sekarang dilupakan atau terlupakan. Hingga kini kajian budaya belum mempunyai ranah yang terdefiniskan dengan jelas. Ia tumbuh subur pada batas-batas dan pertemuan pada bermacam wacana yang sudah dilembagakan, terutama sastra, sejarah, linguistik, semiotik, antropologi, sosiologi, filosofi, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebudayaan sebagai produk sosial dapat dijelaskan dalam dirinya sendiri dan dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, atau relasi sosial.

Untuk mengantisipasi metode kajian budaya yang “kebablasan”, khususnya untuk menjembatani pandangan yang sudah kuat yaitu mazhab empiris (Inggris) dan mazhab pragmatis (Amerika), maka kajian budaya di Indonesia hendaknya tidak berat sebelah, melainkan masih memperhatikan aspek obyektivitas tetapi juga menekankan perlunya aspek nilai (Bahm, 1980:14). Dengan kata lain, landasan kajian budaya di Indonesia hendaknya senantiasa memperhatikan etika dan moral (Sastrapratedja, 2004:2). Hal ini untuk menghindari penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sifatnya sensasional dan kurang memperhitungkan tanggungjawabnya di masyarakat, dan justru merugikan masyarakat yang diteliti. Di sinilah pentingnya peran filosofi dalam kajian budaya di Indonesia, yang senantiasa mengikuti perkembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan, sehingga filosofi bisa menghadapi penyimpangan ilmu pengetahuan dan eksisnya.

Penutup

Artikel ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: (i) Kajian budaya memiliki nilai signifikan sebagai usaha untuk mengatasi krisis dan mengantisipasi eksek globalisasi yang demikian cepat. Dengan mengutamakan pendekatan multidisipiner, berarti kajian budaya merupakan perangkat ilmu pengetahuan yang lebih cair dan terbuka; (ii) Kajian budaya memiliki hubungan logis dengan filosofi karena metode yang dipakai adalah metode kritis, sehingga penalaran yang digunakan sifatnya kefilosofan; (iii) Filosofi dapat membantu mencapai kebenaran dan kenyataan, melalui komponen ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kebenaran dan kenyataan bukanlah suatu yang sudah jadi atau selesai,

melainkan suatu paradigma yang selalu terbuka, dan (iv) Dengan memahami ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka cakrawala ilmiah dalam kajian budaya dapat diperluas dan diperdalam sehingga para ilmuwan akan bijak, terhindar dari arogansi intelektual yang kurang memperhatikan tanggungjawab sosial.

Untuk merealisasi konsep dan gagasan tersebut perlu diperhatikan hal-hal, sebagai berikut: (i) Kajian budaya merupakan kajian komprehensif multidisipliner, menggunakan metode kritis, dan memikirkan masyarakat yang termarginalkan. Untuk itu dalam menyelesaikan krisis dewasa ini dan dampak globalisasi, maka kajian budaya perlu dikembangkan untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan; (ii) Filosofi disepakati dapat membantu penalaran akademis, karena itu diharapkan dapat menyangga kajian budaya dalam menciptakan masyarakat intelektual dan ilmuwan profesional yang memiliki etika dan moral untuk ikut memikirkan proses modernisasi di Indonesia dan mengatasi eksensya; (iii) Lembaga-lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi perlu ikut mensosialisasikan pentingnya kajian budaya dalam rangka mengantisipasi eksens globalisasi yang meluas di tanah air Indonesia.

Sekarang ini diperlukan kebijakan negara yang dapat melindungi kekuatan budaya sendiri, dan tidak membiarkan industri budaya diarahkan oleh pasar yang tidak peduli pada kandungan isi yang dapat melemahkan jati diri bangsa. Oleh karena itu pada dewasa ini sangat penting mengembangkan kajian budaya di Indonesia dengan keberpihakan pada “industri budaya” yang bertumpu pada nilai-nilai yang ada di tanah air sendiri. Meskipun demikian agar keberpihakan itu tidak mengurangi nilai obyektivitas dalam kajian ilmiah, maka kajian budaya yang dikembangkan perlu dilandasi dan dikembangkan secara filosofis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Books.

- Bahm, Archie J. 1980. "What is Science?". Dalam *Axiology: The Science of Values*. World Books, New Mexico: Albuquerque. Hlm. 14–49.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Penerjemah Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat*. Jilid 1 & 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Joesoef, Daoed. 1987. "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan". Dalam Soeroso H. Prawirohardjo, dkk. (ed.). *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat. Hlm. 1–37.
- Kartodirdjo, Sartono. 2003. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, Ignas. 2006. "Cultural Studies dan Masalah Kebudayaan di Indonesia" (makalah). Seminar Peringatan Berdirinya Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, 20 Februari.
- Marcuse, Herbert. 1964. *One Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.
- Mihardja, Achdiat K. 1998. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mudana, I Gede. 2003. *Pemahaman Budaya di Tengah Perubahan*. Denpasar: Program Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: LPSP & PT Gramedia.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Penerjemah Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastrapratedja, M. 2004. "Landasan Moral Etika Penelitian". Makalah pada Semiloka Tentang Etika Penelitian Perguruan Tinggi, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 10 Maret.

- Sedyawati, Edi. 2004. “Kesadaran Budaya dalam Pendidikan, Informasi, dan Industri”. Makalah pada Seminar Nasional Kesadaran Budaya Memperkuat Bangsa, Jakarta, 15 Januari.
- Storey, John. 2004. *Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Penerjemah Elli El Fajri. Yogyakarta: Qalam.
- Sindhunata. 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Van Peursen, C.A. 1985. *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Diterjemahkan oleh J. Drost. Jakarta: PT Gramedia.
- Wibisono, Koento. 1987. “Filsafat Pancasila dan Aliran-Aliran Filsafat Barat”. Dalam Soeroso H. Prawirohardjo, dkk. (Ed.). *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat. Hlm. 38–45.
- Wibisono, Koento. 2004. “Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Budaya”. Paper bahan kuliah Filsafat Ilmu, pada Program Pascasarjana S-3 Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, 29 September.

